



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

BIDANG : EKSEKUTIF  
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TOMY PERDANA**
2. Jabatan : **DIREKTUR KERJA SAMA DAN KEMITRAAN ALUMNI**
3. NHK : **898994**

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/204 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.550.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	650.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV 1.5 E Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOBIL, HONDA CRV 1.5 TURBO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	63.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	299.998.316
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.162.998.316</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>233.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.929.998.316</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.